

**“PERSPEKTIF KEWENANGAN KEJAKSAAN ATAS PELAKSANAAN  
*RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR”**

**Iqram Syah Putra**

**Abstrak**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum serta Lembaga negara yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah Bagaimana pengaturan terkait kewenangan kejaksaan atas pelaksanaan *restorative justice* dan bagaimana implementasi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. *Restorative justice* dinilai mampu menjadi solusi dalam penyelesaian perkara secara cepat dengan prinsip utama mengedepankan partisipasi antara korban, pelaku dan masyarakat. Implementasi penerapan *Restorative justice* sebagai model penyelesaian perkara saat ini dapat dijadikan pedoman dalam kasus tindak pidana ringan khususnya implementasi yang dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Penelitian ini dilaksanakan dengan Pendekatan Perundang-undangan dengan menggunakan data kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* secara tegas diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan Implementasi penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sejak diterbitkannya Perja tersebut masih terbilang cukup rendah yang mana dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan baik internal maupun eksternal didalam penerapannya.

Kata kunci: Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan

**“PERSPEKTIVE OF THE PROSECUTOR'S AUTHORITY OVER THE  
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT  
OF MINOR CRIMINAL ACTIONS AT THE OGAN ILIR DISTRICT  
PROSECUTOR'S OFFICE”**

**Iqram Syah Putra**

***Abstract***

*The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is one of the law enforcement agencies and state institutions whose function is to exercise state power, especially in the field of prosecution. The problems raised in this thesis are how the arrangements related to the prosecutor's authority for the implementation of restorative justice and how to implement the application of restorative justice in the settlement of minor crimes at the Ogan Ilir District Prosecutor's Office. Restorative justice is considered capable of being a solution in resolving cases quickly with the main principle of prioritizing participation between victims, perpetrators and the community. The implementation of the application of Restorative justice as a model for resolving cases at this time can be used as a guide in cases of minor crimes as regulated in the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative justice, especially the implementation carried out by the Ogan Ilir District Prosecutor's Office. This research was carried out with a statute approach using library data, namely normative juridical which was carried out by examining library materials or secondary materials that were collected and analyzed and researched. The authority of the Prosecutor's Office in the implementation of Restorative Justice is expressly regulated in the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice and Implementation of Restorative Justice at the Ogan Ilir District Prosecutor's Office since the issuance of the Regulation is still quite low, which is because there are still several obstacles, both internal and external in its implementation.*

*Keywords: prosecutor, restorative justice, minor crimes*